

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pulau Madura terkenal dengan penduduknya yang taat beragama. Namun demikian, pulau ini juga memiliki reputasi sebagai tempat dengan tradisi yang seringkali melibatkan kekerasan dalam berbagai bentuknya. Praktik kekerasan ini umumnya dilakukan oleh sebagian kelompok *blater*. Pengaruh tradisi ini sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Madura. *Blater* sendiri merupakan sebuah produk sosial dan budaya yang memiliki peranan strategis dalam tatanan masyarakat Madura (Syamsuddin, 2015). Dikenal dengan mengusung kekerasan sebagai alat utama mencapai kekuasaan dan posisi strategis dalam strata sosial masyarakat, tentu saja keberadaannya cukup diperhitungkan bahkan seringkali disandingkan dengan kiai dan politisi sebagai bagian dari elit lokal Madura. Dalam ranah sosial *blater* juga disegani sebagai sebuah kelompok atau individu yang memiliki kekuatan, kehidupan mereka yang penuh kekerasan dan disegani membuatnya diperlakukan istimewa dalam sosial masyarakat, utamanya dalam lingkup pedesaan di pulau Madura.

Keberadaan atau eksistensi dari *blater* diketahui telah ada sejak zaman kerajaan di pulau Madura dan masa kolonial Belanda, hal itu telah menjadikan *blater* sebagai bagian dari sejarah pulau Madura. Umumnya ada dua cara yang membuat seorang individu digelari *blater* dan mampu mencapai posisi

“elit” dalam tatanan masyarakat Madura. *Pertama*, dengan kemampuan ilmu beladiri, *kanuragan*, keberanian, serta jaringan komunikasi dan memiliki pengaruh yang kuat, bahkan memiliki banyak pengikut. Juga memiliki riwayat dalam memenangkan duel *carok* dan mampu menyelesaikan sengketa atau konflik dalam lingkungan masyarakat. *Kedua*, terlibat dalam aksi kriminal serta kekerasan, baik langsung maupun tidak langsung sehingga membuat kedudukan *blater* mampu mencapai tingkat “elit” dalam lingkungan suatu masyarakat di Madura khususnya pedesaan (Kosim, 2012).

Dalam istilah Laswell, elit adalah mereka yang memiliki dan mendapatkan lebih dari apa yang dimiliki dan didapatkan oleh orang lain (Kosim, 2012). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa *blater* merupakan salah satu dari elit desa yang peranannya sangat penting dalam menentukan tingkat keamanan suatu wilayah. Dalam pengertian yang umum, istilah "elit" mengacu pada kelompok orang yang memiliki posisi tinggi di masyarakat (Sila, 2019). Semakin kuat pengaruh *blater* di masyarakat luas, semakin tinggi pengaruhnya terutama ketika diperkuat dengan adanya dukungan oleh keluarga yang kompak, memiliki ilmu beladiri dan kekuatan spiritual yang baik, serta memiliki banyak pengikut dan jaringan yang luas, hal inilah yang nantinya mengukuhkan kedudukan *blater* sebagai “elit” dalam sosial masyarakat Madura.

Dalam banyak kasus, seringkali *blater* disamakan dengan *bajingan* karena sama-sama menggunakan kekerasan sebagai alat untuk mencapai kekuasaan. Dalam beberapa situasi, *bajingan* dianggap lebih rendah dari *blater* dan

memiliki stigma negatif. *Bajingan* dikaitkan dengan sifat congkak, sombong, dan menebar keonaran, sehingga dianggap lebih buruk daripada *blater*. Namun, pada kenyataannya, penggunaan kedua istilah tersebut sangat bergantung pada situasi dan konteks, dan maknanya bisa berbeda-beda. Ainillah (2016) berpendapat bahwa Secara keseluruhan, *blater* merupakan sebutan untuk sesepuh masyarakat Madura yang memiliki kedudukan istimewa. Tidak semua individu dapat disebut sebagai *blater*, melainkan hanya mereka yang telah mendapatkan julukan tersebut dari masyarakat setempat. Julukan *blater* merupakan suatu pengakuan dari masyarakat di wilayah tersebut. Penobatan menjadi *blater* bervariasi, dapat berdasarkan kharisma atau keberanian yang dimiliki individu tersebut. Sementara Chalik (2017:240) berpendapat bahwa di masyarakat Madura bagian timur (Pamekasan dan Sumenep) dan Madura Pandalungan (Situbondo, Jember dan sekitarnya yang berbahasa Madura), istilah *bajingan/bajing* lebih akrab dijumpai namun keduanya tetap memiliki substansi dan makna yang sama.

Pemilihan kepala desa di masyarakat Madura adalah sebuah peristiwa politik dan juga termasuk peristiwa kultural dalam masyarakatnya. Pemilihan kepala desa merupakan salah satu proses penting dalam pengelolaan pemerintahan desa. Proses ini melibatkan berbagai aktor politik, termasuk *blater*, yang memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi hasil pemilihan dan kebijakan yang diterapkan di tingkat desa.

Di Madura, pemilihan kepala desa tak hanya sebatas pada perebutan kekuasaan, namun lebih mendalam lagi peristiwa tersebut juga bisa

dikategorikan sebagai perebutan pengaruh, status kehormatan, dan harga diri. Karena hal tersebut, Rozaki (2009) berpendapat untuk menjadi salah satu calon dalam pemilihan kepala desa di Madura, diperlukan kekuatan personal serta relasi yang luar biasa untuk menambah pengaruh serta dukungan. Di sini *blater* memiliki peran penting, sehingga tak jarang mereka dijadikan alat untuk memperkuat jaringan serta relasi yang luar biasa dalam kontestasi politik desa di Madura.

Pemilihan Kepala Desa diatur dalam berbagai peraturan yang mencakup tingkat nasional maupun daerah. Pada tingkat nasional, peraturan yang mengatur Pilkades adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Peraturan tersebut memberikan landasan hukum dan ketentuan umum mengenai proses Pilkades di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, dalam Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, terdapat pengaturan lebih lanjut mengenai Pilkades yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Peraturan Menteri ini memberikan panduan dan ketentuan teknis pelaksanaan Pilkades yang harus diikuti oleh pemerintah daerah dan peserta Pilkades.

Di tingkat daerah, Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sumenep diatur dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala

Desa. Peraturan Bupati ini merupakan implementasi dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional dan mengatur secara lebih rinci mengenai proses Pilkades di Kabupaten Sumenep. Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut, Pemilihan Kepala Desa menjadi proses politik yang melibatkan hampir setiap desa, termasuk desa-desa yang berada di Kabupaten Sumenep.

Peraturan-peraturan tersebut menjadi acuan penting dalam mengatur dan mengawasi seluruh tahapan Pilkades, termasuk pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa, guna memastikan terselenggaranya proses Pilkades yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

Sementara perilaku politik dalam masyarakat desa di Madura terbilang masih berpusat pada penggunaan kekuatan dan dominasi antar kelompok masyarakat. Berbeda dengan kiai yang menyebarkan pengaruh dan kekuasaannya dalam politik desa melalui pendekatan keagamaan atau keshalehan, *blater* memiliki metode yang berlawanan untuk mempengaruhi dan memotivasi masyarakat untuk berada pada posisi yang sama dengan dirinya. *Blater* menurut Kosim (2012) bahkan tidak segan melakukan tindak kekerasan atau teror demi mendapatkan kekuatan dan pengaruh dalam kontestasi kekuasaan politik desa. Hal ini sering mengakibatkan kerugian bagi pihak yang lain, karena *blater* digunakan sebagai alat oleh penguasa atau kepentingan tertentu untuk memperkuat pengaruh dan kekuasaannya dalam politik desa.

Sesuai dengan pemaparan di atas, perilaku politik dari *blater* memegang peranan sentral dalam banyak kasus pelaksanaan aktivitas politik bagi masyarakat Madura karena kekuatan serta dominasi yang dimilikinya, *blater* juga dianggap sebagai kaki tangan dari pemegang kekuasaan serta bandit sosial dalam politik desa. Di wilayah lain di Indonesia, fenomena perilaku politik bandit sosial atau elit dalam tatanan sosial masyarakat yang menggunakan jalur kekerasan serta mirip dengan perilaku politik *blater* juga ada, hanya nama dan istilahnya saja yang berbeda-beda. Di Banten misalnya, masyarakat Banten memberi istilah *jawara* kepada mereka yang memiliki gerakan serta ruang lingkup kehidupan yang mirip dengan *blater*. *Jawara* juga berperan sebagai *informal leader*, pesilat, jagoan, penguasa, preman pasar, pemain debu, dan alat kontrol politik dengan kekerasan dan *kharisma* sebagai ciri khas yang dibawanya (Irfani, 2011).

Kelompok-kelompok *jawara* dan kelompok-kelompok *blater* merupakan dua dari banyak kelompok *strongmen* yang telah lama menjadi bagian penting dalam sejarah kelompok-kelompok sosial-budaya lokal di Indonesia dan juga sejarah kekerasan. Kelompok-kelompok ini telah memberikan identitas dan ciri khas dalam perkembangan sejarah di Indonesia (Pribadi, 2015). *Jawara* maupun *blater* merupakan kelompok yang secara umum sangat berbeda dengan kiai sebagai pemilik utama otoritas keagamaan serta elit dalam masyarakat Banten ataupun Madura, keduanya terkadang disejajarkan dalam usaha mereka mencapai kuasa di sebuah wilayah karena kekerasan, keberanian, bahkan kriminalitas mereka. Dengan kekuatan serta jaringan

komunikasi yang luas, tak jarang *jawara* ataupun *blater* menjadi kunci utama dalam kontestasi politik di suatu wilayah atau kelompok masyarakat.

Menurut Sudijono Sastroatmodjo dalam (Sudrajat, n.d.) Identitas kolektif yang dimiliki oleh masyarakat turut menentukan perilaku politik, dan menurut Ramlan Surbakti, faktor-faktor identitas kolektif ini mencakup identitas yang bersifat primordial, sakral, personal, dan bersifat sipil. Faktor primordial, seperti hubungan kekerabatan, suku, bahasa, wilayah, dan adat istiadat, memiliki pengaruh terhadap perilaku politik seseorang. Oleh karena itu, saat seseorang mengekspresikan perilaku politiknya, hal ini mungkin didasarkan pada faktor-faktor kekerabatan, suku, bahasa, wilayah, atau adat istiadat. Dengan demikian, perilaku politik dapat diartikan sebagai tanggapan atau reaksi individu terhadap aktivitas politik di suatu daerah. Karakteristik perilaku politik suatu masyarakat dapat ditentukan oleh sejauh mana budaya politik berakar kuat dalam masyarakat tersebut. Dengan kata lain, budaya politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku individu dalam menanggapi dunia politik. Budaya politik juga berperan dalam mengikat perilaku politik seseorang. (Ravyansah et al., 2022).

Di kabupaten Sumenep sendiri, *blater* atau juga disebut *bajingan* masih memiliki andil besar dalam ranah perpolitikan desa, utamanya desa-desa pinggiran yang masih memegang erat kelokalannya. Di Sumenep *blater* lebih sering diberi peran sebagai propagandis politik, pemegang informasi dan kuasa structural non-formal (Hamzah et al., 2018). Dan pada saat masa pemilihan kepala desa, mereka menjadi pembantu utama calon kepala desa

untuk memenangkan dirinya dalam kontes politik tingkat desa tersebut (Rizal, 2018). Seringnya, *blater* memiliki peran sebagai propagandis lapangan atau bisa disebut juga penjaja suara dari pintu ke pintu, berbekal pengaruh yang dimilikinya mereka akan melakukan segala cara untuk memenangkan siapapun yang diusungnya, meskipun dengan cara yang tergolong kriminal sekalipun.

Pemilihan lokasi dalam penelitian ini sendiri menjadikan kabupaten Sumenep sebagai lokasi penelitian dengan pemilihan tiga desa yang berbeda dalam tiga kecamatan, yaitu desa Ellak Daya dalam wilayah kecamatan Lenteng, desa Matanair dalam wilayah kecamatan Rubaru, dan desa Kolpo dalam wilayah kecamatan Batang-batang. Pemilihan lokasi tersebut berlandaskan pendekatan kultural yang berbeda dalam setiap karakteristik, wilayah geografis, dan kondisi sosial masyarakatnya.

Dengan karakteristik kasar dan unggul dalam segi kekuatan, *blater* kerap dijadikan sebagai propagandis dalam kontestasi politik desa (Khoiri, 2017). Hal ini bukan tanpa sebab, dengan karakteristik seperti yang dijabarkan di atas, *blater* juga memiliki *kharisma* yang luar biasa di mata masyarakat pedesaan. Oleh karena itu mereka kerap kali digunakan pengaruhnya untuk menggaet dukungan maupun menebar ancaman dalam skala masyarakat desa, bahkan kecamatan.

Dalam praktek administrasi publik dan politik di Indonesia, masih terdapat tindakan yang tidak menggambarkan nilai-nilai demokrasi. Seiring dengan isu dan fenomena yang ada, masyarakat mulai memandang bahwa demokrasi

tidak memberikan manfaat serta kemakmuran yang signifikan dan menyebabkan ketidakamanan. Proses pembuatan kebijakan juga terpengaruh oleh intervensi dari elit yang bisa berasal dari lembaga formal seperti lembaga legislatif maupun dari luar lingkup pemerintahan (Bakri, 2020).

Hal tersebut juga terjadi di desa Matanair, Rubaru. Di mana kekuatan serta sengketa kekuasaan para elit lokal informal seperti *blater/bajing* memberikan dampak yang sangat luar biasa dalam implementasi demokrasi pemilihan kepala desa di desa tersebut yang hingga saat ini akibat dari sengketa kekuasaan tersebut masih terasa dampaknya.

Elit politik *keblateran* dan administrasi publik sendiri memiliki keterkaitan yang kompleks dalam kancah politik lokal. *Blater* adalah kelompok elit politik yang berkuasa dan berpengaruh dalam sosio-kultur-struktural masyarakat Madura memiliki kepentingan dan agenda sendiri. Elit lokal seperti *blater* sangat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik, kinerja birokrasi dan *governance*, serta reformasi administrasi di tingkat lokal dengan cara-cara yang seringkali tidak demokratis dan tidak berorientasi pada kepentingan umum dan bahkan elit politik lokal seperti *blater* juga menolak atau menghambat upaya-upaya untuk melakukan reformasi administrasi di tingkat lokal karena merasa terancam oleh perubahan-perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas administrasi (Haryanto, 2009).

Dari penjelasan tersebut bisa dikatakan bahwa karakteristik politik di pedesaan Madura sangat erat dengan *local wisdom*-nya. Keberadaan kekuatan tradisional-kultural seperti *blater* sebagai elit di wilayah pedesaan

Madura, termasuk Sumenep merupakan bagian dari ajang kontestasi dan perebutan kuasa dan taji dalam struktur masyarakat lokal yang sangat berpengaruh membentuk implementasi politik dan perilaku politik masyarakat ataupun jajaran pemerintahan desa di wilayah tersebut. Hal demikian tentu saja juga berhubungan dengan jalannya pemerintahan desa yang secara garis besar berkaitan juga dengan persoalan administrasi publik.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Perilaku Politik *Blater* Pada Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Perilaku Politik *Blater* Pada Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sumenep.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk menguji teori elit yang dikemukakan oleh Suzanne Keller.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan evaluasi atau masukan terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala desa di kabupaten Sumenep.

1.5 Sistematika Penelitian

BAB I: PENDAHULUAN

Merupakan pengantar dari penelitian ini yang mencakup latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian kualitatif ini, akan diuraikan tinjauan pustaka dan kerangka teori yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Bagian ini terdiri dari penelitian sebelumnya dan kerangka teori.

BAB III: METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian ini. Bagian-bagian dalam bab ini meliputi fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, instrumen penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan validitas data.

BAB IV: GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari profil Desa Matanair Kecamatan Rubaru, Desa Ellak Daya Kecamatan Lenteng, dan Desa Kolpo Kecamatan Batang-batang. Termasuk struktur organisasi, kondisi demografis, serta kondisi geografis dari tiga desa tersebut.

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi deskripsi temuan dari bukti langsung berupa data, dokumen dan wawancara bersama informan terkait.

BAB VI: PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

